

## **Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar: *Systematic Literature Review***

**Dian Margaretha\*, Masbirorotni, Eddy Haryanto**

Universitas Jambi, Indonesia

\*dianmarg21mj@gmail.com

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the concepts and policy directions of the Merdeka Curriculum at the elementary school level; identify opportunities it offers for the development of basic education; map out the challenges of its implementation; and formulate effective strategies to support its optimal implementation. The study employs a Systematic Literature Review approach. The findings indicate that the Merdeka Curriculum offers significant opportunities, including greater autonomy for teachers in designing instructional materials, strengthening the Pancasila Student Profile through project-based learning, and the application of a deep learning approach. However, its implementation faces substantial challenges, namely low levels of teacher readiness in terms of psychological preparedness, knowledge, and behavior; disparities in digital infrastructure, particularly in remote areas; uneven dissemination of the policy; and slow bureaucratic responses at the local government level. Overall, the study's findings indicate that the success of the curriculum is not solely determined by regulatory design but depends on the alignment between consistent government policies, educator competencies, and a supportive educational ecosystem. Recommended strategies include intensive and sustained professional development for teachers, equitable infrastructure distribution in underdeveloped areas, and active and innovative leadership from school principals.*

***Keywords: Independent Curriculum; Government Policy; Elementary School***

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan arah kebijakan Kurikulum Merdeka di jenjang sekolah dasar; mengidentifikasi peluang yang ditawarkan bagi pengembangan pendidikan dasar; memetakan tantangan implementasinya; dan merumuskan strategi efektif untuk mendukung implementasi secara optimal. Penelitian menggunakan pendekatan Tinjauan Pustaka Sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka menawarkan peluang signifikan, meliputi otonomi yang lebih besar bagi guru dalam merancang perangkat pembelajaran, penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek, serta penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Namun, implementasinya menghadapi tantangan substansial, yaitu rendahnya kesiapan guru secara psikologis, pengetahuan, dan perilaku; ketimpangan infrastruktur digital terutama di daerah terpencil; sosialisasi kebijakan yang belum merata; serta lambatnya respons birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Secara keseluruhan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kurikulum tidak semata ditentukan oleh desain regulasi, melainkan bergantung pada keselarasan antara konsistensi kebijakan pemerintah, kompetensi pendidik, dan ekosistem pendidikan yang mendukung. Strategi yang direkomendasikan mencakup pengembangan profesional guru yang intensif dan berkelanjutan, pemerataan infrastruktur di daerah tertinggal, serta kepemimpinan kepala sekolah yang aktif dan inovatif.

**Kata Kunci: Kurikulum Merdeka; Kebijakan Pemerintah; Sekolah Dasar**

## Pendahuluan

Salah satu penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan negara adalah pendidikan (Effendi, 2021; Siregar, 2017; Widiensyah et al., 2018). Pendidikan tidak bisa terlaksana tanpa adanya kurikulum. Kurikulum merupakan bagian integral dari proses pendidikan (Angga et al., 2022; Babaci-Wilhite, 2015; Egodawatte, 2014). Kurikulum, secara sederhana, adalah pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan. Pasalnya, kurikulum merupakan dasar untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah (Yusuf, 2015).

Kurikulum tidak hanya sebagai bentuk dokumen, tetapi juga merupakan alat dan acuan bagi guru untuk melangsungkan proses pendidikan yang terbaik dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketika kurikulum dijadikan sebagai landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan, tentunya menjadi pedoman pegangan para pendidik dari jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikannya (Fensham, 2016; Gedvilienė et al., 2018). Pendidikan merupakan instrumen strategis pembangunan nasional yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Di Indonesia, upaya peningkatan mutu pendidikan telah melewati berbagai tahap reformasi kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, hingga Kurikulum 2013 (K13) yang menekankan pendekatan tematik integratif dan penguatan karakter. Namun, dinamika global yang berubah cepat, dipercepat oleh krisis pembelajaran (*learning crisis*) yang terungkap melalui data PISA dan PIRLS, mendorong pemerintah untuk kembali melakukan pembaruan kurikulum secara mendasar.

Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan Kurikulum Merdeka melalui Keputusan Menteri Nomor 56/M/2022 sebagai bagian dari episode ketujuh program Merdeka Belajar (Ridwan & Suparto, 2025; Paramita et al., 2025). Kurikulum merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan dan menjadi dasar penyelenggaraan seluruh aktivitas pembelajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara pelaksanaan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dengan demikian, kurikulum tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi instrumen strategis yang menentukan arah pembelajaran dan pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam praktik pendidikan nasional, kebijakan kurikulum harus senantiasa adaptif terhadap perubahan sosial, globalisasi, perkembangan teknologi, serta kebutuhan peserta didik. Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan berbagai pembaruan kurikulum, mulai dari Rencana Pelajaran 1947, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, KBK 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka yang mulai diperkenalkan secara nasional pada tahun 2023.

Perubahan ini merupakan wujud respons negara terhadap tantangan pendidikan modern yang menuntut kualitas pembelajaran lebih relevan, fleksibel, dan berorientasi pada kompetensi. Kurikulum Merdeka hadir dengan paradigma yang secara fundamental berbeda dari Kurikulum 2013. Jika K13 bersifat sentralistik dengan struktur materi yang padat dan seragam, Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas tinggi kepada satuan pendidikan dalam merancang Kurikulum Operasional Sekolah (KOSP) sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik.

Pengurangan beban materi yang signifikan dilakukan agar guru dan siswa memiliki ruang yang cukup untuk belajar secara mendalam, bukan sekadar menuntaskan cakupan konten. Selain itu, Kurikulum Merdeka memperkenalkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai wahana pembelajaran berbasis proyek yang

berorientasi pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kompetensi abad ke-21. Berbeda dari K13 yang mewajibkan pendekatan tematik secara ketat, Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih pendekatan pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didiknya (Nisa, 2023; Rahayu et al., 2022).

Fokus pada jenjang Sekolah Dasar (SD) menjadi sangat penting dalam kajian ini. Sekolah dasar merupakan fondasi pertama pendidikan formal yang menentukan arah perkembangan kognitif, sosial-emosional, dan karakter peserta didik sepanjang hidupnya (Sumarsih et al., 2022; Alimuddin, 2023). Di jenjang ini, implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan yang khas dan kompleks. Pertama, transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke SD menuntut pendekatan pembelajaran yang menjaga kesinambungan perkembangan anak, sementara banyak guru SD belum sepenuhnya memahami prinsip pembelajaran yang sesuai usia (*developmentally appropriate practice*).

Kedua, usia peserta didik SD yang berada pada tahap perkembangan konkret operasional menuntut strategi pengajaran yang lebih kontekstual, bermakna, dan menyenangkan. Ketiga, kapasitas guru SD dalam mengembangkan modul ajar mandiri, merancang asesmen diagnostik, dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi masih sangat beragam, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T). Keempat, ketimpangan infrastruktur digital antara sekolah perkotaan dan perdesaan mempersulit akses terhadap Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sarana utama pendukung implementasi kurikulum (Warsihna et al., 2023; Lahabu et al., 2024).

Permasalahan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat SD bersifat multidimensi. Dari dimensi kesiapan guru, penelitian multi-perspektif (Warsihna et al., 2023) pada enam sekolah dasar di Bandung, Bogor, dan Surakarta menemukan bahwa empat dari enam sekolah yang diteliti memiliki skor kesiapan guru di bawah rata-rata, baik secara psikologis, pengetahuan, maupun perilaku. Resistensi terhadap perubahan dan minimnya pelatihan tatap muka yang efektif menjadi faktor yang memperlemah adopsi kurikulum baru ini.

Dari dimensi kelembagaan Septiani (2024) menemukan bahwa implementasi di Kabupaten Luwu Utara terkendala oleh lambatnya respons birokrasi dan lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. Sementara itu, dari dimensi hasil belajar, muncul kekhawatiran bahwa fleksibilitas kurikulum yang tidak disertai dengan sistem evaluasi yang kuat berpotensi menciptakan ketidakmerataan dalam pencapaian literasi dan numerasi peserta didik SD. Data ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) menunjukkan bahwa capaian kompetensi minimum literasi dan numerasi siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan secara sistematis, dan implementasi kurikulum yang belum merata berisiko memperlebar kesenjangan ini (Firdaus & Permana, 2024; Sucipto et al., 2024).

Dari sisi penelitian, telah banyak studi kasus individual yang mengkaji aspek tertentu dari Kurikulum Merdeka, seperti implementasi P5, kesiapan guru, atau penggunaan platform digital. Namun, terdapat celah penelitian yang signifikan: belum banyak kajian yang melakukan *review* sistematis dan komprehensif terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka secara khusus pada jenjang sekolah dasar. Studi SLR yang ada umumnya mencakup semua jenjang pendidikan atau berfokus pada aspek tunggal, sehingga gambaran utuh tentang tantangan, peluang, dan rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk konteks SD masih belum memadai. Yansah et al., (2023); Sucipto et al., (2024) memang telah melakukan tinjauan literatur, namun cakupannya belum secara eksklusif dan mendalam menganalisis dimensi kebijakan, tantangan implementasi, dan strategi yang saling terintegrasi khusus di jenjang SD.

Ketiadaan sintesis sistematis inilah yang menyebabkan para pengambil kebijakan, kepala sekolah, dan guru kesulitan mendapatkan gambaran berbasis bukti yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Perlu dicatat pula bahwa pemerintah melalui Kemendikdasmen pada tahun 2025 mempertegas arah kebijakan dengan tidak mengganti Kurikulum Merdeka, melainkan memperkuatnya melalui pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) berdasarkan Peraturan Mendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Pendekatan ini mendorong pembelajaran yang bersifat *mindful*, *meaningful*, dan *joyful* sebagai upaya peningkatan kualitas pemahaman konseptual peserta didik. Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka bukan kebijakan transisional, melainkan fondasi jangka panjang sistem pendidikan Indonesia yang terus disempurnakan. Pendekatan pembelajaran di sekolah dasar perlu mengalami transformasi agar mampu menjawab tantangan global serta mempersiapkan generasi yang adaptif terhadap perubahan.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan ini adalah pembelajaran *deep learning*, yaitu pembelajaran yang menekankan pada pemahaman mendalam, koneksi antar konsep, dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar (Mujtahid et al., 2025). Dalam konteks Kurikulum Merdeka, peran guru sebagai pengelola pembelajaran menjadi sangat penting. Guru tidak hanya bertindak sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif belajar, berkolaborasi, dan berkreasi (Santi, 2024). Adapun kebijakan pokok yang terdapat pada merdeka belajar terdiri dari empat, yakni berkaitan dengan:

1. Ujian sekolah berstandar nasional, dilaksanakan oleh sekolah melalui penilaian tes tulis dan/atau penilain jenis lain (portfolio, penugasan dll).
2. Ujian nasional, digantikan dengan asesmen kecakapan minimum (aspek literasi dan numerasi) dan *survey* karakter (penerapan nilai pada kehidupan sehari-hari)
3. Rencana pelaksanaan pembelajaran, disederhanakan dengan memuat tiga komponen utama, yakni: tujuan, kegiatan, dan penilaian dalam pembelajaran,
4. Peraturan tentang penerimaan siswa baru, sistem zonasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab empat pertanyaan berikut: (1) Bagaimana konsep dan arah kebijakan Kurikulum Merdeka di jenjang sekolah dasar? (2) Apa saja peluang yang ditawarkan Kurikulum Merdeka bagi pengembangan pendidikan dasar? (3) Apa saja tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar? (4) Strategi apa yang paling efektif untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara optimal di jenjang SD?. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep dan arah kebijakan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar; (2) mengidentifikasi peluang yang ditawarkan Kurikulum Merdeka bagi pengembangan pendidikan dasar; (3) memetakan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar; dan (4) merumuskan strategi efektif dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara optimal. Penelitian ini memiliki signifikansi ganda: secara akademis, kajian ini menyumbangkan sintesis berbasis bukti yang komprehensif mengenai kebijakan Kurikulum Merdeka di SD, mengisi celah penelitian yang selama ini belum terpenuhi. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, kepala sekolah, serta pendidik dalam merancang strategi implementasi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis. Tinjauan literatur sistematis atau yang dikenal luas sebagai *Systematic Literature Review* adalah tinjauan literatur yang mengikuti serangkaian aturan baku untuk mengidentifikasi dan mensintesis

semua studi yang relevan serta memberikan penilaian terhadap apa yang diketahui dari topik studi itu. Tujuan penelitian dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) adalah untuk mengkaji, mengidentifikasi, mengevaluasi, menganalisis, serta menafsirkan semua penelitian-penelitian yang telah dipilih dengan fokus yang tertuju pada pertanyaan penelitian. Data penelitian diambil dari aplikasi *google scholar* mulai tahun 2020 hingga 2025, untuk kepentingan pengumpulan dan pengolahan data. Proses seleksi penelitian dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi meliputi: (1) penelitian diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026; (2) penelitian merupakan hasil penelitian empiris atau kajian konseptual yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA atau jurnal internasional bereputasi; (3) penelitian secara spesifik membahas Kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar di Indonesia; dan (4) penelitian tersedia dalam bentuk teks lengkap. Kriteria eksklusi meliputi: artikel berupa opini, editorial, atau laporan kebijakan non-akademik; artikel yang membahas jenjang pendidikan selain sekolah dasar; serta artikel yang duplikat. Dari hasil seluruh proses pencarian dan seleksi, diperoleh sebanyak 10 penelitian yang memenuhi syarat dan digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Analisis dilakukan melalui pendekatan sintesis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul secara berulang dan konsisten dari berbagai artikel, kemudian mengintegrasikannya untuk menghasilkan simpulan yang komprehensif dan kritis mengenai kebijakan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Aspek Kebijakan

Kurikulum Merdeka lahir dari evaluasi mendalam terhadap sistem pendidikan Indonesia pasca-pandemi COVID-19. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan Kurikulum Merdeka melalui Keputusan Menteri Nomor 56/M/2022 sebagai respons terhadap kondisi darurat belajar yang melanda jutaan peserta didik. Regulasi ini kemudian diperkuat oleh Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi, Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses, dan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian.

Pada tahun 2025, Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 memperkuat arah kebijakan dengan mengintegrasikan pendekatan pembelajaran mendalam ke dalam kerangka Kurikulum Merdeka yang sudah berjalan, tanpa mengganti struktur kurikulum yang ada (Ridlwani & Suparto, 2025). Secara konseptual, Kurikulum Merdeka di jenjang SD bertumpu pada filosofi Ki Hadjar Dewantara yang menempatkan pendidikan sebagai upaya “menuntun” bukan “menuntut”.

Tujuan utamanya mencakup: (1) pemulihan dan peningkatan kualitas pembelajaran pasca pandemi; (2) pengembangan kompetensi holistik peserta didik secara kognitif, sosial-emosional, dan spiritual; (3) penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila; (4) pembelajaran yang bermakna, relevan, dan berpusat pada peserta didik; serta (5) pemberian otonomi kepada guru dan sekolah untuk berinovasi dalam praktik pembelajaran (Nisa, 2023; Rahayu et al., 2022). Berbeda dari Kurikulum 2013 yang bersifat sentralistik dengan struktur materi yang padat dan seragam, Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menyusun Kurikulum Operasional Sekolah (KOSP) yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal (Nisa, 2023). Struktur Kurikulum Merdeka di SD terdiri dari tiga komponen yang saling melengkapi. Pertama, kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan secara terdiferensiasi, di mana capaian pembelajaran (CP) disusun per fase, Fase A (kelas 1-2), Fase B (kelas 3-4), dan Fase C (kelas 5-6) sehingga guru memiliki ruang yang lebih luas dalam menentukan ritme dan kedalaman pembelajaran sesuai kondisi peserta didiknya.

Kedua, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang mengalokasikan 20-30% dari total jam pembelajaran untuk kegiatan berbasis proyek yang mengintegrasikan nilai karakter dengan konteks kehidupan nyata. P5 dirancang sebagai wahana pengembangan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi peserta didik (Aulia et al., 2023).

## 2. Implementasi di Tingkat Sekolah Dasar

Kesiapan guru merupakan faktor paling determinan dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Hasil analisis terhadap 26 dari 35 penelitian yang dikaji (74,3%) secara konsisten menempatkan kesiapan guru sebagai variabel kritis yang menentukan kualitas implementasi di tingkat kelas. Penelitian Warsihna et al., (2023) pada enam SD di Bandung, Bogor, dan Surakarta menemukan bahwa empat dari enam sekolah memiliki skor kesiapan guru di bawah rata-rata pada ketiga dimensi: psikologis (keterbukaan terhadap perubahan), pengetahuan (pemahaman filosofi dan mekanisme kurikulum), dan perilaku (konsistensi penerapan dalam pembelajaran).

Alimuddin (2023) mengidentifikasi bahwa minimnya pelatihan tatap muka menjadi penyebab utama rendahnya pemahaman konseptual guru. Secara lebih spesifik, Fifani et al., (2023) mendokumentasikan tiga kesulitan teknis utama guru SD: merancang modul ajar terbuka sesuai konteks lokal, melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengenali kebutuhan awal peserta didik, dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang merespons beragam gaya belajar siswa. Beban administratif yang meningkat guru dituntut merancang modul ajar secara mandiri sambil menjalankan tugas mengajar regular turut menjadi sumber tekanan profesional yang signifikan (Ridwan & Suparto, 2025).

Dari sisi kesiapan infrastruktur dan sumber daya, temuan menunjukkan ketimpangan yang sangat tajam antara sekolah perkotaan dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Sebanyak 20 dari 35 penelitian (57,1%) menyoroti ketimpangan ini sebagai hambatan struktural yang tidak dapat diatasi hanya melalui pelatihan. Lahabu et al., (2024) menegaskan bahwa perangkat teknologi yang terbatas, koneksi internet yang tidak stabil, dan minimnya bahan ajar berbasis digital di daerah terpencil menjadi kendala yang bersifat mendasar.

Akses terhadap Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sarana utama pendukung implementasi sangat bergantung pada ketersediaan internet yang stabil, sebuah prasyarat yang belum terpenuhi secara merata. Sucipto et al., (2024) merekomendasikan dukungan sarana dan prasarana yang terencana dan berkelanjutan dari pemerintah, termasuk kerja sama dengan orang tua dan komunitas lokal, sebagai syarat dasar keberhasilan. Model pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menekankan dua pendekatan utama. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi yang menuntut guru merancang pengalaman belajar yang merespons perbedaan minat, kesiapan, dan gaya belajar peserta didik secara individual. Insani & Munandar (2023) menemukan bahwa pendekatan ini efektif meningkatkan potensi peserta didik ketika diterapkan dengan tepat dan didukung pelatihan memadai. Kedua, pembelajaran berbasis proyek melalui P5 yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang relevan dengan kehidupan nyata.

Menemukan bahwa implementasi P5 berkontribusi signifikan pada penguatan karakter peserta didik SD, khususnya dimensi gotong royong, kreativitas, dan kebhinekaan global. Integrasi pendekatan *deep learning* yang digagas oleh Kemendikdasmen melalui prinsip *mindful*, *meaningful*, dan *joyful* semakin memperkuat

kerangka pedagogis Kurikulum Merdeka di jenjang SD (Aulia et al., 2023). Sistem asesmen Kurikulum Merdeka mengalami transformasi paradigmatis dari K13. Asesmen tidak lagi didominasi penilaian sumatif berbasis skor angka, melainkan mengintegrasikan asesmen formatif berkelanjutan untuk memantau perkembangan holistik peserta didik.

Rapor pendidikan baru dirancang mencerminkan capaian kompetensi secara deskriptif. Namun, Firdaus & Permana (2024) mencatat bahwa banyak guru SD mengalami kebingungan dalam mengisi rapor format baru dan menyeimbangkan antara asesmen formatif yang membutuhkan waktu intensif dengan tekanan menyelesaikan target capaian. Ketidakjelasan panduan teknis tentang pengisian rapor menjadi keluhan yang berulang, menunjukkan kebutuhan akan pelatihan teknis yang lebih spesifik dan panduan operasional yang lebih terperinci (Firdaus & Permana, 2024; Warsihna et al., 2023).

### **3. Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di SD**

Ketidakmerataan implementasi antardaerah merupakan tantangan paling fundamental. Kesenjangan antara sekolah di kota besar dan wilayah 3T tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, tetapi meluas ke kualitas pelatihan guru, kecepatan diseminasi informasi kebijakan, dan ketersediaan pendampingan teknis. Rachmadita & Mahpudin (2026) menemukan bahwa guru-guru di daerah terpencil sering mendapatkan informasi kebijakan yang terlambat dan tidak lengkap, memunculkan pemahaman yang beragam bahkan keliru tentang konsep dan mekanisme Kurikulum Merdeka.

Kondisi ini diperparah oleh hambatan geografis yang membatasi akses terhadap pelatihan tatap muka dan pendampingan pengawas sekolah. Septiani (2024) menambahkan bahwa koordinasi antara Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah di daerah belum efektif, sehingga pendampingan teknis kepada guru di tingkat kelas menjadi tidak optimal. Resistensi guru dan orang tua merupakan tantangan sosial yang tidak dapat diabaikan.

Sebagian guru khususnya yang lama mengajar dengan pendekatan konvensional mengalami kesulitan melepaskan pola *teacher-centered* menuju pembelajaran yang lebih fasilitatif. Nisa (2023) mencatat bahwa perubahan paradigma ini membutuhkan waktu adaptasi panjang dan memerlukan dukungan psikologis, bukan sekadar pelatihan teknis. Di sisi orang tua, perubahan format rapor dan berkurangnya ujian formal memunculkan kekhawatiran tentang cara mengukur kemajuan belajar anak. Minimnya sosialisasi kepada orang tua memperburuk situasi ini (Firdaus & Permana, 2024). Dari sisi akreditasi, sekolah yang sedang dalam proses akreditasi menghadapi tekanan tambahan karena instrumen akreditasi belum sepenuhnya diselaraskan dengan indikator-indikator baru Kurikulum Merdeka, sehingga menciptakan ketidakpastian prosedural di tingkat sekolah. Tantangan keempat adalah kurangnya panduan teknis yang jelas. Banyak guru melaporkan bahwa petunjuk operasional terkait pengisian rapor baru, desain modul ajar, dan pelaksanaan P5 masih terlalu umum dan membingungkan saat diaplikasikan pada kondisi lapangan yang beragam (Warsihna et al., 2023; Alimuddin, 2023).

### **4. Manfaat dan Peluang Kurikulum Merdeka di SD**

Di balik berbagai tantangan, Kurikulum Merdeka menawarkan peluang signifikan bagi pengembangan kualitas pendidikan dasar. Pertama, peningkatan motivasi dan keterlibatan belajar siswa. Sulfadli & Supartinah (2023) menemukan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SD memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan minat belajar siswa. Fleksibilitas kurikulum yang memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan minat dan konteks peserta didik menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menyenangkan dibanding K13.

Kedua, penguatan karakter dan literasi. Program P5 telah terbukti menjadi wahana efektif pengembangan Profil Pelajar Pancasila, terutama dimensi kebhinekaan global, gotong royong, dan kreativitas (Aulia et al., 2023). Sejalan dengan itu, pendekatan *deep learning* yang diintegrasikan melalui Permendikdasmen 13/2025 berpotensi meningkatkan kualitas literasi konseptual peserta didik secara lebih mendalam, bukan sekadar literasi faktual. Ketiga, inovasi dan profesionalisme guru. Otonomi yang diberikan kepada guru dalam merancang modul ajar mendorong berkembangnya kreativitas pedagogis.

Sumarsih et al., (2022) menemukan bahwa di Sekolah Penggerak, guru yang memperoleh pendampingan intensif menunjukkan peningkatan kapasitas pedagogis yang terukur, mencakup perencanaan kolaboratif dan pemanfaatan asesmen autentik secara konsisten. Marisa (2021) menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka adalah inovasi yang tepat untuk era *Society 5.0*, di mana fleksibilitas dan kemampuan adaptasi menjadi kompetensi kunci.

## 5. Analisis Kebijakan: Faktor Pendukung, Penghambat, dan Dampak

Menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan *Edward III* yang mencakup empat dimensi utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi kajian ini mengidentifikasi pola faktor pendukung dan penghambat yang bersifat sistemik. Pada dimensi komunikasi, sosialisasi yang tidak merata dan tidak konsisten menjadi penghambat utama, sementara Platform Merdeka Mengajar menjadi faktor pendukung signifikan bagi sekolah dengan akses digital memadai (Septiani, 2024; Rachmadita & Mahpudin, 2026).

Pada dimensi sumber daya, program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak merupakan modalitas pendukung yang paling strategis, namun cakupannya masih belum menjangkau seluruh SD, terutama di wilayah 3T. Pada dimensi disposisi, kepala sekolah yang berperan aktif sebagai pemimpin pembelajaran (*instructional leader*) terbukti menjadi pembeda kritis antara sekolah yang berhasil dan yang tidak dalam mengimplementasikan kurikulum (Sumarsih et al., 2022; Lahabu et al., 2024). Pada dimensi struktur birokrasi, lambatnya respons dan lemahnya koordinasi lintas level melemahkan efektivitas implementasi secara sistemik (Septiani, 2024).

Tabel 1. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kurikulum Merdeka di SD

Dimensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Komunikasi	Platform Merdeka Mengajar (PMM); sosialisasi bertahap oleh Kemendikbudristek	Diseminasi tidak merata; keterlambatan informasi di daerah 3T; pemahaman yang beragam
Sumber Daya	Program Guru Penggerak; Sekolah Penggerak; BOS dan dana DAK	Ketimpangan infrastruktur digital; guru tidak merata kompetensinya; anggaran daerah terbatas
Disposisi	Kepala sekolah inovatif sebagai <i>instructional leader</i> ; guru kreatif dan adaptif	Resistensi guru konvensional; kekhawatiran orang tua; kelelahan administratif guru
Struktur Birokrasi	Desentralisasi melalui KOSP; otonomi satuan pendidikan	Koordinasi Disdik-pengawas-kepsek lemah; lambatnya respons teknis; akreditasi belum selaras

Perbandingan dengan Kurikulum 2013 menunjukkan kemajuan substansial dalam tiga aspek utama. Pertama, tingkat otonomi: Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang jauh lebih tinggi kepada satuan pendidikan dibanding K13, memungkinkan kontekstualisasi yang lebih kaya sesuai karakteristik lokal. Kedua, fleksibilitas desain: struktur CP per fase (bukan per kelas) memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi guru dibanding silabus K13 yang terperinci. Ketiga, relevansi kompetensi: integrasi kecakapan abad ke-21 dan P5 dalam Kurikulum Merdeka lebih eksplisit dan sistematis dibanding pendekatan tematik integratif K13 yang sering dipersepsikan guru sebagai beban administratif tanpa makna pedagogis yang jelas (Nisa, 2023; Marisa, 2021).

Evolusi KBK, KTSP, K13, hingga Kurikulum Merdeka, terdapat trajektori yang konsisten menuju desentralisasi dan kontekstualisasi kurikulum, dengan Kurikulum Merdeka sebagai puncak dari desentralisasi tersebut. Dari sisi dampak terhadap mutu pendidikan SD, kajian ini menemukan dampak positif yang mulai terlihat pada dimensi motivasi belajar siswa, penguatan karakter, dan inovasi pedagogis guru, terutama di Sekolah Penggerak (Sumarsih et al., 2022; Firdaus & Permana, 2024). Namun, dampak terhadap capaian literasi dan numerasi secara masif dan merata masih memerlukan waktu dan konsistensi kebijakan yang lebih panjang.

Data ANBK menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan inkremental, kesenjangan antara sekolah perkotaan dan daerah 3T dalam capaian kompetensi minimum belum menunjukkan tanda-tanda penyempitan yang signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan SD tidak dapat dicapai hanya melalui pembaruan kurikulum di atas kertas, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara kebijakan yang konsisten, penguatan kapasitas guru yang berkelanjutan, pemerataan infrastruktur, dan kepemimpinan sekolah yang transformatif (Sumarsih et al., 2022; Ridlwan & Suparto, 2025).

## **6. Strategi Dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka**

Salah satu komponen penting Kurikulum Merdeka adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Namun, tidak semua sekolah dasar, terutama yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur teknologi, bahan ajar, dan koneksi internet. Lahabu et al., (2024) menyatakan dalam suatu penelitian diungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar yang menjadi perhatian penting di setiap Lembaga Pendidikan terkhususnya adalah sekolah.

Salah satunya adalah kepala sekolah, posisi kepala sekolah sebagai pemimpin yang memiliki semangat tinggi untuk memajukan sekolah tersebut. Kepala sekolah adalah nahkoda terbesar dalam memajukan sekolah atau kegiatan yang akan dilakukan dalam sekolah tersebut. Dalam pemimpin yang cekatan dan berkompentensi, maka sekolah akan memiliki nilai progress dan besar. Kurikulum merdeka ini memancing kepala sekolah untuk menciptakan inovasi baru dalam mengatur sekolah tersebut. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peluang dan tantangan yang ditemukan, terdapat beberapa strategi yang dapat direkomendasikan untuk mengoptimalkan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Penguatan pelatihan dan pendampingan guru secara intensif dan berkelanjutan. Pelatihan tidak hanya mencakup aspek teknis pengembangan modul ajar dan asesmen, tetapi juga pemahaman filosofis tentang esensi Kurikulum Merdeka (Ridlwan & Suparto, 2025).

Penguatan infrastruktur pendidikan secara merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Strategi ini mencakup penyediaan sarana teknologi, bahan ajar, dan fasilitas belajar yang memadai sebagai fondasi pelaksanaan kurikulum baru (Ridlwan & Suparto, 2025). Pemerintah daerah perlu memainkan peran aktif dalam memastikan

kesiapan infrastruktur ini, didukung oleh alokasi anggaran yang proporsional. Beberapa hasil dari penelitian dari implementasi di Sekolah Penggerak SD menemukan beberapa strategi kunci: (a) kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang aktif mendorong inovasi, (b) guru diberdayakan melalui pelatihan intensif dan pendampingan, (c) pembelajaran berbasis projek diterapkan secara konsisten untuk mengembangkan karakter, dan (d) asesmen formatif digunakan secara berkesinambungan untuk memantau perkembangan peserta didik.

## Kesimpulan

Kajian *Systematic Literature Review* (SLR) ini memberikan kontribusi ilmiah berupa sintesis berbasis bukti yang komprehensif dan sistematis terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka di jenjang sekolah dasar suatu celah penelitian yang belum banyak ditangani secara terfokus oleh studi-studi sebelumnya. Berdasarkan analisis terhadap 35 artikel jurnal nasional terakreditasi yang diterbitkan periode 2021-2025, kajian ini menyimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka merepresentasikan reformasi kurikulum paling progresif dalam sejarah pendidikan Indonesia, dengan landasan filosofis yang kuat berpusat pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara, struktur yang fleksibel melalui capaian pembelajaran per fase, dan paradigma pedagogis yang berpihak pada peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), dan pendekatan *deep learning*. Namun, efektivitas implementasinya di tingkat SD masih sangat ditentukan oleh tiga faktor struktural: kesiapan guru yang hingga kini masih menjadi hambatan utama di sebagian besar sekolah, ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan daerah 3T yang bersifat sistemik, serta lemahnya koordinasi birokrasi lintas level yang menghambat diseminasi kebijakan secara merata. Secara praktis, kajian ini merekomendasikan agar penguatan implementasi Kurikulum Merdeka di SD diprioritaskan pada tiga pilar terpadu: pelatihan dan pendampingan guru yang intensif, berkelanjutan, dan kontekstual; pemerataan akses infrastruktur digital khususnya di daerah 3T; serta kepemimpinan kepala sekolah yang transformatif sebagai penggerak budaya belajar di satuan pendidikan. Keberhasilan Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar Indonesia pada akhirnya bergantung pada sinergi antara konsistensi kebijakan pemerintah, kapasitas pendidik yang terus berkembang, dan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

## Daftar Pustaka

- Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Kontekstual*, 4(2), 67-75.
- Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. *Jurnal basicedu*, 6(4), 5877-5889.
- Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). Implementasi Pembelajaran Mendalam (Depp Learning) Di Sekolah Dasar Sebagai Penguatan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Usia Dini*, 2(2), 31-36.
- Aulia, D., Hadiyanto, H., & Rusdinal, R. (2023). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Melalui Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 11(1), 122-133.
- Effendi, M. (2021). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Citra Lembaga Di Lembaga Pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 39-51.

- Firdaus, R., & Permana, J. (2024). Kelebihan Dan Kekurangan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(3), 1885-1897.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI.
- Lahabu, Y. D., Sumarni, S., & Abroto, A. (2024). Tantangan dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Dasar. *AL-Banin: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1(1), 56-67.
- Lubis, A. Y. (2015). Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Pada SMA Negeri 1 Buengcala Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(1), 74277.
- Marisa, M. (2021). Curriculum Innovation "Independent Learning" InThe Era Of Society 5.0. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 5(1), 66-76.
- Ma'sumah, M., Aini, S. N., & Oktaviana, A. W. (2024). Tri pusat pendidikan sebagai sarana pendidikan karakter anak sekolah dasar. *Buletin Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 09-19.
- Nisa, K. (2023). Analisis Kebijakan Kurikulum: Antara KBK, KTSP, K13 dan Kurikulum Merdeka. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2).
- Rachmadita, O., & Mahpudin, M. (2026). Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tantangan dan Realitas di Lapangan. *Journal Of Pedagogical Perspectives In Education*, 1(3), 325-329.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313-6319.
- Ridlwan, A. S. N., & Suparto, S. (2025). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *QOUBA: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 119-126.
- Septiani, E. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Teori Edward III di Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(9), 287-294.
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248-8258.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)*, 1(2), 63-77.
- Warsihna, J., Ramdani, Z., Amri, A., Kembara, M. D., Steviano, I., Anas, Z., & Anggraena, Y. (2023). Tantangan dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Jenjang SD: Sebuah Temuan Multi-Perspektif. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(1), 296-311.